

SURAT KETERANGAN (SK) BIMBINGAN SKRIPSI

DARI DEKAN FISIP UNIGAL

	UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH Nomor : 0691/35/SK/AK/D/XII/2023	
TENTANG PENGUKUHAN MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH TAHUN AKADEMIK 2023/2024	
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH,	
Menimbang	: a. bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, diharuskan melakukan penulisan dan penyusunan Skripsi; b. bahwa untuk membantu dalam menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan Skripsi dibutuhkan dosen pembimbing; c. bahwa sebagai tindak lanjut a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2022; 5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Galuh.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan Kesatu	: Nama : FIRDA TARI TRIANI NIM : 3506200070 Sebagai Peserta Bimbingan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2023/2024, dengan judul Skripsi : "Efektivitas Kebijakan Sustainable Development Goals Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ciamis" .
Kedua	: Mahasiswa tersebut pada butir kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan Skripsi dibimbing oleh : 1. Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos.,M.Si., sebagai pembimbing I 2. Dr. H. Budi Setiadi, M.Si., sebagai pembimbing II
Ketiga	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
Keempat	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Ciamis Pada tanggal : 28 Desember 2023 Dekan  H. Cecer Cahya Supena, S.H.,M.H.,M.Si. NIM. 024117001	
	

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KESBANGPOL

KABUPATEN CIAMIS

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Tentara Pelajar No. 09 Kel. Ciamis Ciamis46211
Telp. (0265) 771101 e-mail: kesbangpolciamis@gmail.com

Nomor : 000.9.2/219-Bakesbangpol.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Ciamis, 14 Maret 2024

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis

di-

TEMPAT

I. Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis Nomor: 0090/35/SP/AK/DI/II/2024 Tanggal 14 Maret 2024 Perihal Surat Keterangan Penelitian.

II. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Pra Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :

Nama : **FIRDA TARI TRIANI**
NIM : **3506200070**
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
Jl. R.E. Martadinata No. 150
Maksud : Melaksanakan Keterangan Penelitian
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis
Lamanya : 14 Maret s.d 14 April 2024
Judul : **"EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIAMIS"**

Penanggung Jawab : **ETIH HENRIYANI, S.IP.,M.SI.**

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

1. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan;
2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/rencana yang ditetapkan;
3. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi;
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ciamis
Pada tanggal 14 Maret 2024

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Dr. R. YADI TISYADI, SE., M.Si
NIP. 196804102001121003

Tembusan :

Yth. : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis ;
5. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara serta keasliannya dapat dibuktikan pada https://e-office.ciamiskab.go.id/verifikasi_surat, kode: MJQ4ZGNH



PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Efektivitas Kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ciamis. Aspek yang diamati meliputi:

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai capaian kinerja dalam program SDGs Desa dalam indikator desa tanpa kemiskinan di Kabupaten Ciamis.

B. Aspek yang diamati:

1. Alamat/lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.
2. Suasana/iklim DPMD Kabupaten Ciamis.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.
4. Bidang Pemerintah Desa.

PEDOMAN WAWANCARA

“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIAMIS”

Nama Informan :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Hari dan Tanggal :

Pertanyaan Wawancara:

1. Tepat Kebijakan, dengan indikator:
 - a. Adanya ukuran ketercapaian implementasi kebijakan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis;
 - 1) Bagaimana ukuran ketercapaian implementasi kebijakan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis?
 - 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SDGs Desa?
 - 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis?
 - b. Keberhasilan implementasi SDGs Desa dalam menekan angka kemiskinan;
 - 1) Bagaimana implementasi kebijakan SDGs Desa yang dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis?

- 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan SDGs Desa untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis?

2. Tepat Pelaksana, dengan indikator:

a. Pelaksana program SDGs Desa;

- 1) Bagaimana pelaksana program SDGs Desa?
- 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksana program SDGs Desa?
- 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksana program SDGs Desa?

b. Sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan SDGs Desa;

- 1) Bagaimana sumber daya yang digunakan dalam kebijakan SDGs Desa?
- 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sumber daya yang digunakan untuk menjalankan kebijakan SDGs Desa?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam sumber daya yang digunakan untuk kebijakan SDGs Desa?

3. Tepat Target, dengan indikator:

a. Jangkauan perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan SDGs Desa;

- 1) Bagaimana jangkauan perubahan yang diinginkan dari adanya implementasi kebijakan SDGs Desa?
 - 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam jangkauan perubahan yang diinginkan dari kebijakan SDGs Desa?
 - 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam jangkauan perubahna yang diinginkan dari kebijakan SDGs Desa?
- b. Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dengan mengembangkan program SDGs Desa;
- 1) Bagaimana pengembangan program SDGs Desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu?
 - 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengembangan program SDGs Desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu?
 - 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengembangan program SDGs Desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu?
4. Tepat Lingkungan, dengan indikator:
- a. Kepentingan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan SDGs Desa;
 - 1) Bagaimana kepentingan yang terlibat dala pelaksanaan kebijakan SDGs Desa?

- 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kepentingan kebijakan SDGs Desa?
 - 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang yang dihadapi dalam kepentingan kebijakan SDGs Desa?
- b. DPMD menjalankan tugas untuk melaksanakan kebijakan SDGs Desa Kabupaten Ciamis;
- 1) Bagaimana DPMD menjalankan tugas untuk melaksanakan kebijakan SDGs Desa Kabupaten Ciamis?
 - 2) Bagaimana hambatan-hamabatan yang dihadapi DPMD dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan kebijakan SDGs Desa Kabupaten Ciamis?
 - 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi DPMD dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan kebijakan SDGs Desa Kabupaten Ciamis?
5. Tepat Proses, dengan inidkator:
- a. Reliabilitas dalam melakukan pelaksanaan kebijakan sesuai pedoman yang berlaku;
- 1) Bagaimana reliabilitas dalam melakukan pelaksanaan kebijakan SDGs Desa agar sesuai pedoman yang berlaku?
 - 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam reliabilitas pelaksanaan kebijakan SDGs Desa agar sesuai pedoman yang berlaku?

3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan hambatan yang dihadapi dalam reliabilitas pelaksanaan kebijakan SDGs Desa agar sesuai pedoman yang berlaku?

b. Adanya penyusunan agenda prioritas pelayanan terhadap pelaksanaan kebijakan SDGs Desa;

1) Bagaimana penyusunan agenda prioritas pelayanan terhadap pelaksanaan kebijakan SDGs Desa?

2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyusunan agenda prioritas pelayanan terhadap pelaksanaan kebijakan SDGs Desa?

3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyusunan agenda prioritas pelayanan terhadap pelaksanaan kebijakan SDGs Desa?

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 1

Nama : Ape Ruswandana, SP.

Jabatan : Kepala DPMD

Tanggal : 19 April 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Assalamualaikum pak, sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Saya Firda mahasiswi tingkat akhir dari jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unigal. Izin untuk mewawancarai bapak terkait kebijakan program SDGs Desa di Kabupaten Ciamis ini.	<p>“Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang SDGs Desa tentunya sangat membantu dan menguntungkan bagi setiap daerah, karena SDGs memberikan suatu konsep pembangunan sederhana tapi dampaknya sangat kompleks bagi keberlanjutan suatu daerah dalam hal ini terkhusus desa. Ukuran ketercapaian SDGs Desa di Kabupaten Ciamis terbilang cukup baik, dari 18 indikator SDGs Desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama”.</p> <p>“Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan SDGs Desa ini, dimana salah satunya ada pada Sumber Daya Manusia. Kadang kami dari DPMD kurang paham terkait beberapa konsep SDGs Desa. Konsep SDGs Desa itu terlihat sederhana tetapi diperlukan suatu pemikiran yang bisa tanggap dalam proses mencernanya, dan tentunya kesulitan itu juga seringkali dihadapi oleh desa. Karena pelaksanaan SDGs ini bukan hanya perihal data</p>

		<p>mendata saja tetapi juga harus ada output yang bisa dikembangkan agar impact kebijakannya dapat terasa oleh masyarakat. Selain itu, server pusat yang seringkali down membuat proses input data SDGs terkendala. Hal tersebut bisa dibilang terjadi setiap tahun, sehingga membuat data dari setiap desa tidak bisa dikirim tepat waktu”.</p> <p>“Beberapa pejabat fungsional diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan SDGs Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, hal tersebut dilakukan agar permasalahan dari segi SDM dapat terminimalisir, sedangkan untuk permasalahan server kami selalu menghimbau kepada setiap desa untuk melakukan uploading pada jam dini hari”.</p>
2.	<p>Bagaimana jangkauan perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan SDGs Desa?</p>	<p>“Untuk jangkauan perubahan atau target yang diinginkan dari adanya kebijakan SDGs Desa sudah pasti ada, salah satunya ialah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Kami berharap dengan berjalannya program SDGs Desa dapat memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan di Ciamis sampai dengan 0%, dan untuk skor keseluruhan indikator yang diambil dari pemutalhiran data per bulan Mei 2024 Kabupaten Ciamis mendapat capaian skor SDGs sebesar 51,56%”.</p>

		<p>“Kalau untuk hambatannya pastinya banyak dan salah satunya ada pada teknis pelaksanaan dan kemampuan pembiayaan. Untuk bisa mencapai satu indikator saja kita membutuhkan anggaran yang besar. Dan ini akan menjadi PR yang cukup berat bagi beberapa desa yang masuk pada kategori desa berkembang (swadaya), karena anggaran dan waktu tempuh capaiannya akan membutuhkan waktu yang lumayan lama dibanding desa-desa yang sudah ada pada kategori mandiri”.</p> <p>“Salah satu upaya yang bisa kami lakukan ialah menyelaraskan program SDGs Desa dengan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang di prioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.</p>
3.	Bagaimana pengembangan program SDGs Desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu?	<p>“Adanya kebijakan SDGs ini bisa kita pahami sebagai pembangunan jangka panjang dengan fokus prinsip menjaga keberlanjutan dukungan alam pada kehidupan sosial budaya manusia. Sejak adanya peraturan yang mengharuskan pembangunan berbasis SDGs ini tentunya membawa angin segar karena banyak cara alternatif untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di Kabupaten Ciamis senantiasa menekankan adanya pola pembangunan yang mengutamakan</p>

		<p>pemberdayaan masyarakat supaya bisa mengembangkann potensi hidupnya, dan tiada lain itu semua merupakan contoh implementasi konsep pembangunan berkelanjutan ini”.</p> <p>“Kondisi masing-masing wilayah tentunya berbeda, perbedaan tersebut mengindikasikan beda pula garis mulai dalam implementasi program SDGs dan tingkat kesulitan usaha untuk mencapai target tanpa kemiskinan pun akan sangat berbeda dan hal tersebut mempengaruhi perkembangan pembangunan yang dilakukan. Selain itu, dalam penilaian kinerja pencapaian SDGs membutuhkan bukti nyata yang ditunjukkan dengan data nyata yang bukan berdasar pada asumsi sehingga bentuk treatment yang diberikan akan sesuai dengan urgensi kebutuhan”.</p> <p>“Perlu adanya penguatan kerjasama dengan semua pihak, serta keterbukaan anggaran dan penganggaran. Pemerintah pusat maupun daerah harus menginisiasi terbangunnya kerjasama yang setara”.</p>
--	--	--

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 2

Nama : Haikal Mujahid, S. Sos

Jabatan : Pejabat Fungsional PMPKD

Tanggal : 19 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Assalamualaikum pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin untuk mewawancarai bapak terkait keberhasilan SDGs Desa dalam menekan angka kemiskinan.	<p>“Penerapan SDGs Desa tentunya membawa angin segar bagi pemerintah dalam melakukan suatu usaha untuk menyejahterakan masyarakatnya. Apalagi SDGs Desa ini membawa misi suci untuk pengentasan kemiskinan, tentu saja dalam pengimplementasiannya banyak memberikan manfaat. Salah satu cara dalam implementasi SDGs Desa untuk pengentasan kemiskinan ialah dengan pengelolaan dana desa yang harus disesuaikan dengan urgensi kebutuhan masyarakat yang sifatnya jangka panjang. Keberhasilan pengelolaan dana desa secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat”.</p> <p>“Untuk hambatan pastinya ada, pengimplementasian SDGs Desa ini jika dilihat secara konsep memang terlihat sederhana, tetapi fakta dilapangan tidak semua desa dapat mengimplementasikan konsep SDGs Desa ini, hal tersebut dipengaruhi oleh urgentitas atau kebutuhan setiap desa berbeda dan itu akan berpengaruh pada pengelolaan dana</p>

		<p>desa yang mereka gunakan, sehingga SDGs Desa dalam pengentasan kemiskinan akan terpengaruh pula”.</p> <p>“Salah satu upaya yang kita lakukan ialah dengan terus berkordinasi dengan desa-desa di Kabupaten Ciamis untuk senantiasa Kembali pada fokus utama yaitu kesejahteraan masyarakat, dan kami selalu menghimbau kepada setiap desa untuk seefektif mungkin dalam penggunaan dana desa karna itu akan bersifat signifikan bagi proses pembangunan masyarakat”.</p>
2	<p>Bagaimana kepentingan aktor yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan SDGs Desa?</p>	<p>“Implementasi kebijakan public akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumberdaya atau sumber-aktor. Salah contoh adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan efektif jika kerjasama anatar stakeholder terkait tidak terbangun secara efektif”.</p> <p>“Sejauh ini belum ada hambatan terkait hal tersebut, karena pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan secara inklusif dan membutuhkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan yang selama ini memiliki banyak perbedaan atau bahkan seringkali bertentangan untuk melakukan rekonsiliasi menuju sintesis baru secara sinergis melakukan aksi bersama, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yakni pembangunan berkelanjutan”.</p>
3	<p>Bagaimana reliabilitas dalam melakukan pelaksanaan kebijakan SDGs Desa agar sesuai pedoman yang berlaku?</p>	<p>“Dalam hal reliabilitas sangat diperlukan suatu akurasi data, kualitas data yang dihasilkan dari proses pendataan SDGs Desa yang dilakukan oleh para pokja relawan pendataan SDGs. Efektivitas kinerja pencapaian SDGs Desa</p>

		<p>menggantungkan pada hitungan data yang berkualitas yang terukur, akurat dan pastinya sesuai dengan fakta dilapangan”.</p> <p>”Saat ini sedang berlangsung pemutakhiran data SDGs Desa, setiap desa di kabupaten Ciamis tengah melakukan upload data ke pusat, dalam hal tersebut sering terjadi eror system sehingga data yang sudah di upload terpending dan kadang bisa hilang. Selain itu, jika proses pemutakhiran data tidak sesuai dengan fakta dilapangan maka akan mempengaruhi arah kebijakan kedepannya, karna setiap pendataan akan menjadi acuan bagi kami dan pemerintah desa dalam menentukan program selanjutnya”.</p> <p>“Membangun budaya data baik dikalangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa maupun dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus diubah dan dibenahi baik menyangkut sistem, struktur, dan kelembagaan. Semua pihak harus menanamkan bahwa keputusan yang baik hanya bisa diambil dan dikerjakan menggunakan data detil, nyata sesuai fakta lapangan, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin, dengan keyakinan tersebut jika kita sama-sama menjalankannya dengan penuh komitmen dan konsistensi pencapaian SDGs Desa dapat diwujudkan”.</p>
--	--	--

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 3

Nama : Andi Sopyandi, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintah Desa

Tanggal : 25 April 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Assalamualaikum pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin untuk mewawancarai bapak. Bagaimana DPMD menjalankan tugas untuk melaksanakan kebijakan SDGs Desa Kabupaten Ciamis?	<p>“Program kemiskinan yang ada di pedesaan saat ini terlalu dibebani tugas-tugas pembangunan yang sebenarnya bukan tanggungjawab program tersebut. Sebagai contoh, pembangunan fisik jalan, gorong-gorong, irigasi, dan lainnya, dimana hal tersebut menyedot dana yang tidak sedikit, sehingga substansi kemiskinan yang dialami oleh kelompok orang miskin kurang memperoleh perhatian penuh”.</p> <p>“Kita selalu mengupayakan untuk terus menguatkan koordinasi dan melakukan pengawasan serta pendampingan yang dibantu oleh pendamping desa P3MD Kabupaten Ciamis untuk merevitalisasi Kembali paradigma, arah, dan startegi lainnya supaya pemerintah desa dan instansi terkait dapat benar-benar fokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan SDGs Desa ini”.</p>

2	Bagaimana penyusunan agenda prioritas pelayanan terhadap pelaksanaan SDGs Desa?	“Penyusunan agenda prioritas pelaksanaan SDGs Desa harus disesuaikan dengan urgensi kebutuhan di masing-masing desa, setelah itu akan dirumuskan bersama pada Musyawarah Desa (Musdes) yang selanjutnya dilakukan pengarahannya, pembinaan, dan evaluasi produk perencanaan pembangunan desa”.
---	---	--

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 4

Nama : Atik

Jabatan : Pendamping Desa

Tanggal : 6 Mei 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>Assalamualaikum ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin untuk mewawancarai ibu.</p> <p>Bagaimana pelaksana program SDGs Desa?</p>	<p>“Pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa ialah Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa, Pemerinrah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi.</p> <p>“Terkait dengan hambatan pastinya ada, dan yang seringkali terjadi ialah kurangnya ketanggapan pendata SDGs Desa”.</p> <p>“Salah satu upaya yang kami lakukan ialah dengan memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa khususnya kepada relawan pendata untuk senantiasa melakukan pelatihan terlebih dahulu”.</p>
2	<p>Bagaimana sumber daya yang digunakan dalam kebijakan SDGs Desa?</p>	<p>“Sumber daya yang digunakan dalam kebijakan SDGs Desa tentunya sumber daya manusia yang merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kemudian ada juga sumber daya alam. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi desa dan adanya</p>

		<p>otonomi desa tersebut diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian negara melalui pengelolaan sumber daya alam dan kearifan lokal di wilayah desa”.</p> <p>“Terkait hambatan yang dihadapi yaitu minimnya pengetahuan dan keahlian Pemerintah Desa mengenai pelaksanaan SDGs Desa, belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada”.</p> <p>“Upaya yang kami lakukan ialah dengan terus berkordinasi dengan pemerintah desa untuk membahas terkait bagaimana konsep SDGs Desa dan teknis pelaksanaanya”.</p>
--	--	---

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 5

Nama : Elin Herlina

Jabatan : Kepala Desa Cikong

Tanggal : 8 Mei 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana jangkauan perubahan yang diinginkan dari adanya implementasi kebijakan SDGs Desa?	“Adanya implementasi suatu kebijakan pastinya karena terdapat target yang diinginkan, adapun target dari SDGs Desa digunakan untuk mengetahui sejauhmana skor atau pencapaian setiap desa dalam mengimplementasikan program SDGs Desa demi tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk desa Cikoneng sendiri belum mencapai target yang diharapkan. Dan untuk skor keseluruhan dari semua kategori Desa Cikoneng berada di angka 59,60%. Data tersebut dilihat dari hasil pemuatakhiran SDGs Desa per tanggal 15 Mei 2024”.
2	Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam jangkauan perubahan yang diinginkan dari kebijakan SDGs Desa?	“Terkait dengan hambatan pastinya ada, salah satunya dalam membangun pemahaman publik (masyarakat) terkait bagaimana pembangunan berbasis SDGs Desa ini. Selain itu, minimnya ketersediaan data yang berkualitas, detil, nyata, terukur, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan”.
3	Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi	“Kami senantiasa mengupayakan segala cara agar program SDGs Desa ini bisa berjalan optimal di dkesa kami, salah satunya memperkuat koordinasi dengan DPMD dan senantiasa mengikuti

	dalam jangkauan perubahan yang diinginkan dari kebijakan SDGs Desa?	pelatihan terkait bagaimana proses pendataan sampai pada pemutakhiran data SDGs Desa”.
--	---	--

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1

Wawancara Bersama Kepala DPMD



Gambar 2

Wawancara Bersama Pejabat Fungsional DPMD



Gambar 3
Wawancara Bersama Pendamping Desa



Gambar 4
Diskusi Bersama Kabid Pemdes DPMD



Gambar 5
Wawancara Bersama Pemerintah Desa Cikoneng



Gambar 6
Diskusi Bersama Bagian Kesekretariatan DPMD

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Identitas Diri

Nama Lengkap : Firda Tari Triani
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 7 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 3506200070
E-mail : firdatarii07@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat Rumah : Dsn. Mulyajaya Rt/Rw 002/012 Desa Cisaga Kec.
Cisaga Kab. Ciamis Kode Pos: 43686 Jawa Barat
Nomor Kontak : 085724272410

Riwayat Pendidikan

2020-2024 : Universitas Galuh
2017-2020 : SMA Negeri 1 Cisaga
2014-2017 : SMP Negeri 1 Cisaga

Pengalaman Organisasi

2020-sekarang : Kader Himpunan Mahasiswa Islam
2021-2022 : Ketua HMP IP FISIP Universitas Galuh
2022-2023 : Ketua BEM FISIP Universitas Galuh

“To Get Something You Never Had, You Must Do Something You Never Did”

